

JULI 2018

KEBIJAKAN SATU PETA

OVERVIEW KEBIJAKAN SATU PETA

PERPRES
NO. 9 TAHUN 2016

**Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000**

(Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016)

TUJUAN KEBIJAKAN SATU PETA



1 STANDAR
REFERENSI
BASIS DATA
GEO-PORTAL

MANFAAT KEBIJAKAN SATU PETA

Sebagai acuan untuk:

- Acuan perbaikan data spasial
- Akurasi perencanaan tata ruang
- Akurasi dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan

KEGIATAN UTAMA KEBIJAKAN SATU PETA

Kompilasi

Integrasi

Sinkronisasi

TARGET
PENCAPAIAN



MENGAPA DIBUTUHKAN KEBIJAKAN SATU PETA?

PEMERINTAH



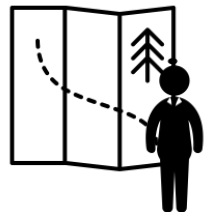
SWASTA



MASYARAKAT



LSM



IMPLIKASI DARI TIDAK ADANYA SATU PETA

KONFLIK DI PERBATASAN DAERAH



Dua kepala daerah menerbitkan izin di lokasi yang sama.

SENKETA TANAH



Sengketa tanah akibat tumpang tindih lebih dari 1 jenis perizinan pada lokasi yang sama.

PEMBANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA RUANG



Lokasi pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang.



Berbagai pemangku kepentingan menggunakan peta dengan format dan standar yang berbeda-beda dalam menjalankan aktivitasnya.

Diperlukan satu peta yang akurat dan akuntabel, serta digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung aktivitasnya.

MANFAAT KEBIJAKAN SATU PETA

Kebijakan Satu Peta bertujuan untuk mewujudkan peta tematik seluruh wilayah Indonesia yang akurat dan akuntabel, sehingga dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian konflik tumpang tindih. Ke depannya, produk Kebijakan Satu Peta agar dapat digunakan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan

MANFAAT

1 Menyelesaikan konflik tumpang tindih yang telah terjadi dan mencegah konflik pemanfaatan ruang kedepannya

2 Meningkatkan akurasi perizinan pemanfaatan lahan

3 Memberikan kepastian investasi dan mencegah penyalahgunaan kekayaan alam

4 Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas daerah di lingkungan pemerintah dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang nasional

5 Meningkatkan kualitas pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang komprehensif

MILESTONE KEBIJAKAN SATU PETA

INTEGRASI

Telah selesai dilakukan Integrasi (perbaikan kualitas peta tematik) untuk seluruh peta yang terkompilasi. Kedepannya, dibutuhkan *update* peta tematik secara konsisten dan berkelanjutan.



SINKRONISASI

Analisis Sinkronisasi (penyelesaian permasalahan tumpang tindih) saat ini sedang berjalan dengan mengacu pada peta tematik hasil Integrasi. Sinkronisasi dikerjakan terlebih dahulu di Pulau Kalimantan.



BERBAGI DATA

Kegiatan Berbagi Data melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta akan diresmikan pada Peluncuran Kebijakan Satu Peta di bulan Agustus 2018.



KOMPILASI

Telah selesai dilakukan kompilasi (pengumpulan) peta tematik dari 19 Kementerian / Lembaga Walidata dan Pemerintah Daerah di 34 Provinsi.

PELUNCURAN KEBIJAKAN SATU PETA

PELUNCURAN KEBIJAKAN SATU PETA

AGUSTUS 2018

Bertujuan untuk meresmikan berbagi data produk Kebijakan Satu Peta melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) **agar dapat digunakan oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan** dalam peningkatan kepastian investasi, pengembangan ekonomi wilayah, serta peningkatan daya saing kawasan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.

KONTEN PELUNCURAN KEBIJAKAN SATU PETA

1

Geoportal Kebijakan Satu Peta yang Mempublikasikan Hasil Integrasi Kebijakan Satu Peta

2

Hasil Kegiatan Sinkronisasi

- SOP / Panduan Sinkronisasi
- Hasil Identifikasi Tipologi Tumpang Tindih di Pulau Kalimantan
- Hasil Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih dengan *Pilot Project* di Provinsi Kalimantan Timur

EXPOSURE KEGIATAN PELUNCURAN



KEMENTERIAN /
LEMBAGA



PEMERINTAH DAERAH
DI 34 PROVINSI



PEMERINTAH KABUPATEN/
KOTA TERPILIH

TERIMA KASIH